

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor bisnis dan keuangan. Perubahan drastis dalam lingkungan bisnis akibat pandemi menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan operasionalnya. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah peran dewan komisaris dalam mengawasi dan memastikan keberlanjutan perusahaan melalui *sustainability report*. Dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan kinerja perusahaan, terutama dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti era pandemi (Sasmiharti & Karyati, 2024).

Karakteristik dewan komisaris, seperti komisaris independen dan kepemilikan manajerial menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penerbitan laporan keberlanjutan yang disajikan oleh perusahaan. Adanya anomali yang muncul akibat pandemi, efektivitas peran dewan komisaris dalam mendorong keterbukaan dan transparansi *sustainability report* masih menjadi pertimbangan. Ukuran perusahaan juga menjadi variabel penting dalam memoderasi hubungan antara karakteristik dewan komisaris terhadap *sustainability report*. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mengelola laporan keberlanjutan,

sementara perusahaan kecil dan menengah menghadapi kendala dalam penyusunan dan pelaporan laporan keberlanjutan yang komprehensif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ukuran perusahaan dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap *sustainability report* di era pandemi COVID19 (Immami et al., 2024).

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* merupakan sarana komunikasi penting untuk menunjukkan transparansi dan tata kelola perusahaan yang efektif dan secara khusus ditujukan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Permintaan informasi dan tekanan dari pemangku kepentingan telah memberikan perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan perusahaan semakin kritis untuk menanggapi tuntutan ini. Dorongan untuk memberikan transparansi kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong peningkatan dalam kualitas pelaporan keberlanjutan. Esensi dan konsep dari *sustainability report* adalah tentang memenuhi kebutuhan informasi yang keberlanjutan dari para pemangku kepentingan terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas operasi bisnis suatu perusahaan (Erin et al., 2022).

Tren laporan keberlanjutan pada perusahaan muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses operasi bisnis. Para pemangku kepentingan semakin menuntut informasi yang lebih lengkap mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas operasional perusahaan. Bagaimana keadaan perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang yang kemungkinan akan terjadi terkait dengan

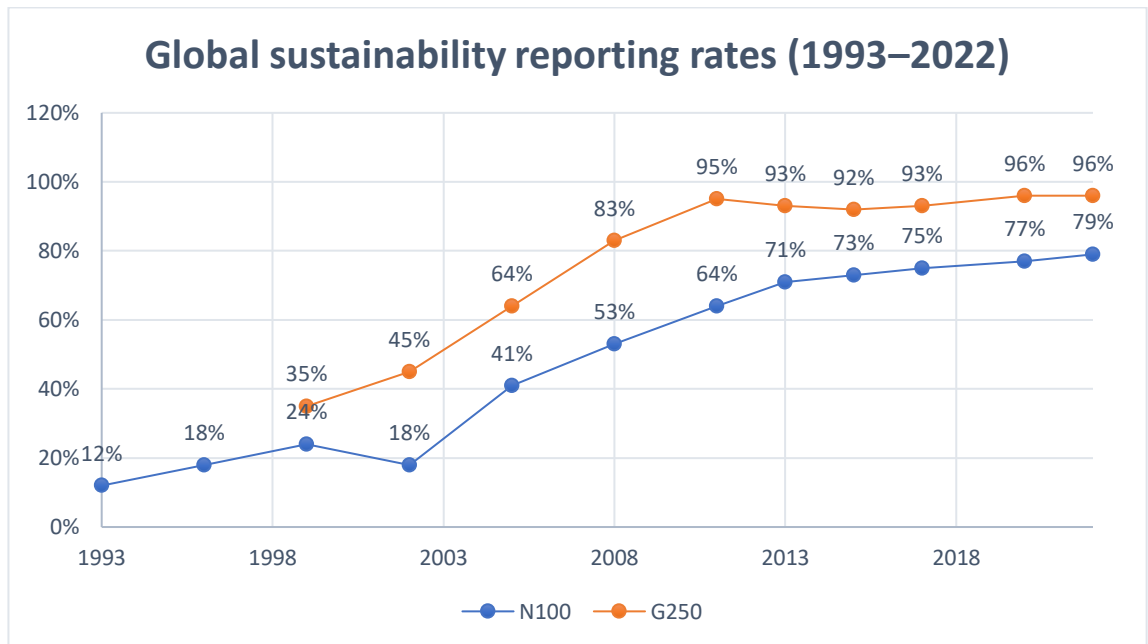
isu-isu berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin memberikan perhatian khusus terkait pelaporan keberlanjutan. Hal ini disebabkan perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang terjadi, menggambarkan bahwa tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masih kurang. Perusahaan sepertinya tidak memperhatikan terkait dampak lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tidak selalu mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lingkungan dan komunitas sekitar yang merupakan dampak dari hasil operasi mereka. (Barung et al., 2018).

Fakta yang terjadi di lapangan menyebutkan Indonesia mengalami kerusakan hutan tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi dari 26 negara yang diteliti, laporan studi ini telah terbit di jurnal internasional PNAS pada 12 September 2022 oleh Stefan Giljum dari Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business, Austria dan tim (Arif, 2022). Deforestasi tropis dari industri pertambangan di Indonesia ini mencapai puncaknya pada periode 2010–2014, Indonesia kehilangan hutan seluas 1.901 kilometer persegi akibat pertambangan, yang menyumbang 0,7 persen dari total kehilangan hutan seluas 267.591 kilometer persegi sejak tahun 2000. Ekstraksi batu bara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi penyebab utama deforestasi terkait pertambangan di Indonesia dan berlanjut hingga hari ini. Dibandingkan

dengan kegiatan padat lahan lainnya, seperti produksi kelapa sawit, dampak deforestasi langsung dari pertambangan ini memang relatif kecil. Namun, selain dampak langsung, industri pertambangan juga memiliki dampak tidak langsung yang meluas terhadap deforestasi (Arif, 2022).

Kasus kecurangan oknum PT Timah (Persero) dengan sejumlah oknum perusahaan swasta di Bangka Belitung merupakan contoh konkret tata kelola pertambangan yang buruk. Penurunan kualitas lingkungan hidup Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah hasil kolusi yang diperkirakan kerugian mencapai Rp 271 triliun (Sidik, 2024). PT Indomiko lebih dari dua dekade beroperasi dan diduga telah menisakan lubang – lubang tambang raksasa yang belum direklamasi (Rahman, 2021). Beberapa isu kerusakan lingkungan telah menyebabkan menurunnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan kurangnya informasi mengenai dampak sosial perusahaan.

Perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat umum, yang mendorong meningkatnya tuntutan dari berbagai kalangan agar perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai akibat dari aktivitasnya. Transparansi informasi mengenai kegiatan perusahaan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk dapat memahami kegiatan perusahaan yang sebenarnya dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menyediakan informasi ini melalui laporan keberlanjutan (Madona & Khafid, 2020).



Gambar 1. 1 Tren Pelaporan Keberlanjutan N100 dan G250 periode 1993-2022

Sumber: KPMG *Survey of Sustainability report 2022*

Hasil penelitian yang diterbitkan oleh KPMG *Survey of Sustainability reporting 2022*, yang terlihat pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase pelaporan akan keberlanjutan pada perusahaan yang tergabung dalam kategori N100 terus meningkat pada setiap survei global mencapai 79% dan kategori G250 mencapai 96% sejak KPMG pertama kali melakukan survey pada tahun 1993. Selama lebih dari satu dekade, 90% atau lebih G250 telah melaporkan keberlanjutan. Jumlah perusahaan yang melapor sejak 2011 tersebut cenderung meningkat antara 93% dan 96% terutama disebabkan oleh komposisi perusahaan di G250. N100 merupakan 100 sampel yang diambil dari 5.200 perusahaan dari 52 negara merujuk pada perusahaan berkapitalisasi pasar besar dan menengah di seluruh dunia yang menerbitkan laporan keuangan tahunan

atau laporan terintegrasi dan laporan keberlanjutan. Sedangkan G250 terdiri dari 250 perusahaan terbesar dari daftar Fortune Global 500 pada tahun 2019. Mayoritas dari G250 juga termasuk di dalam sampel N100. Penelitian tersebut didasarkan atas analisis yang sumber datanya berasal dari keterbukaan informasi secara publik dan tidak ada informasi yang diberikan secara langsung kepada firma KPMG.

Ketika dunia terus berupaya untuk mengatasi berbagai isu keberlanjutan, terdapat fokus yang kuat pada pengembangan standar *sustainability report* yang konsisten, sebanding, dan terpercaya secara global akibat semakin maraknya ajakan untuk meningkatkan transparansi tentang masalah-masalah keberlanjutan dari investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Bisnis yang baik mengupayakan perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan lingkungan alam dan sosial sebagai acuan dalam operasional bisnis, namun juga mendorong perusahaan untuk secara aktif mempublikasikan praktik bisnis berkelanjutan dalam bentuk, seperti laporan tata kelola dan laporan keberlanjutan. Konteks *signaling theory*, bisnis yang baik merupakan sinyal positif bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi calon konsumen dan investor (Prabawani et al., 2023). Bisnis yang berkelanjutan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan akan bertahan dalam jangka panjang. *Sustainability report* merupakan hal yang lebih dari sekadar melaporkan kinerja operasional *Environmental, Social, and Governance* (ESG), namun juga merupakan alat penilaian strategis dan platform komunikasi dengan investor dan berbagai pemangku kepentingan. *Sustainability report* juga berfungsi

sebagai pemeriksaan “kesehatan” tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan untuk peningkatan keberlanjutan dalam memberikan hasil yang bermanfaat bagi bisnis dan pemangku kepentingan perusahaan tersebut (Sudjono, 2023).

Di Indonesia, *sustainability report* telah menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan dan perusahaan terbuka sejak 2019, serta bagi perusahaan tercatat sejak 2020, tetapi akibat pandemi COVID-19 penerapannya ditunda hingga 2021. Pada tahun kedua implementasinya sebanyak 88% perusahaan tercatat di Indonesia telah menyerahkan *sustainability report* untuk tahun 2022. *Sustainability report* berperan sebagai instrumen penting dalam pelaporan ESG bagi perusahaan di Indonesia, mencerminkan strategi mereka dalam menghadapi risiko iklim, melibatkan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kinerja ESG. Laporan ini juga menunjukkan tanggung jawab keberlanjutan direksi, upaya peningkatan keterampilan dalam aspek keberlanjutan, serta memperkuat kredibilitas perusahaan dimata publik. Selain sebagai bentuk transparansi, *sustainability report* juga berfungsi untuk menyelaraskan standar global dan menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan (Sudjono, 2023).

Adanya prinsip *triple bottom line* (3P) pada konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan tiga kriteria, yaitu *People* (Sosial) guna memberikan dampak kesejahteraan pada karyawan dan masyarakat sekitar, *Planet* (Lingkungan) melakukan bisnis dengan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan selama proses operasi bisnis

berlangsung, dan *Profit* (Ekonomi) perusahaan mendapatkan keuntungan secara *financial* yang tentunya sejalan dengan dua penerapan prinsip sebelumnya (Ardiani et al., 2022).

Era globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan mengakibatkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sorotan utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan. GCG tidak hanya terbatas pada cakupan aspek keuangan saja, tetapi juga menjangkau aspek sosial dan lingkungan, seperti yang tercermin dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan yang tentu menerapkan prinsip 3P. Laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting dalam mengkomunikasikan upaya perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan keberlanjutan. Kualitas dari *sustainability report* tidak hanya mempengaruhi citra perusahaan di mata *stakeholders*, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja berkelanjutan perusahaan, maka dari itu *sustainability report* tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat integritas perusahaan dalam mewujudkan prinsip – prinsip GCG secara menyeluruh (Murdianingsih et al., 2022).

Salah satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi pelaporan *sustainability report* adalah karakteristik dewan komisaris. Karakteristik dewan komisaris ini mencakup struktur kepemilikan, komposisi dewan direksi, komite-komite yang ada, serta praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik dewan komisaris yang kuat diyakini dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam operasinya, termasuk dalam menyusun

dan mengungkapkan laporan keberlanjutan. Selain karakteristik dewan komisaris, ukuran perusahaan juga merupakan variabel penting dalam menentukan laporan keberlanjutan (Manase et al., 2022). Perusahaan yang besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengalokasikan pada penyusunan laporan keberlanjutan, termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pelaporan yang canggih. Namun, perhatian terhadap ukuran perusahaan juga menimbulkan pertanyaan tentang kecenderungan perusahaan besar untuk melakukan "*greenwashing*", yaitu praktik memberikan gambaran yang terlalu positif tentang upaya keberlanjutan mereka tanpa mendukungnya dengan tindakan yang sesuai. Penting untuk mengkaji bagaimana komisaris independen, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi *sustainability report*, baik dalam hal transparansi, relevansi, maupun akuntabilitas informasi yang disampaikan kepada *stakeholders* (Bendig et al., 2024)

Menghadapi persaingan global, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan sekaligus keharusan untuk membangun perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, implementasi GCG berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam proses serta mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Penerapan GCG berlaku baik

di sektor pemerintahan, BUMN, maupun swasta merupakan senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan korupsi GCG tetapi juga mujarab dalam menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Riantono, 2014).

Good Corporate Governance merupakan praktik pengelolaan perusahaan yang mengedepankan integritas dan kebijaksanaan dengan menjaga keseimbangan dalam memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Praktik ini sangat diharapkan oleh investor maupun manajemen perusahaan, karena GCG didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan bagi semua pihak, serta tanggung jawab sebagai entitas bisnis yang beretika. Melalui penerapan GCG, pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, ekonomis, dan produktif, dengan tetap berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam menerapkan GCG maka dilakukan *Assesment Good Corporate Governance* secara berkala atau satu tahun sekali, dengan *assessment* diharapkan mampu menghasilkan gambaran peta praktik GCG di perusahaan yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui hal yang sudah ataupun belum dilakukan. Praktik-praktik yang sejalan dengan GCG dapat ditingkatkan pelaksanaannya sedangkan pada kelemahan yang terjadi dapat segera diperbaiki sehingga pelaksanaan GCG dapat menjadi landasan operasional perusahaan. GCG diharapkan mampu menjadi *value drivers* bagi penciptaan nilai tambah perusahaan tidak hanya bagi pemegang saham

perusahaan tetapi juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya atau *stakeholder* (Sutino, 2023).

Peningkatan kinerja perusahaan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu perusahaan. Secara hukum, perusahaan diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) pada tahun 2010. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyebutkan prinsip responsibilitas menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya guna mewujudkan *corporate citizenship*. Sementara itu, komponen utama dalam *governance* mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. (Nasrum, 2014). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi memiliki peran krusial dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif. Direksi bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan perusahaan.

Kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keberlanjutan dengan lebih efisien. Keterbukaan informasi yang semakin tinggi memaksa perusahaan untuk lebih transparan dalam menjelaskan praktik bisnis mereka kepada publik. Tren

laporan keberlanjutan pada perusahaan tidak hanya mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Kesadaran akan isu-isu lingkungan seperti alih fungsi hutan, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam semakin meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih fokus dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan untuk memperkirakan dampak apa yang akan ditimbulkan nantinya. Indikator kuantitatif dapat mencakup angka-angka seperti jumlah komisaris independen dan kepemilikan manajerial apakah berpengaruh dalam pengungkapan *Sustainability report* (SR) dan peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan tersebut, maka dari itu disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh hubungan antara Komisaris Independen terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?

4. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh hubungan antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh hubungan antara Komisaris Independen terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh hubungan antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19?

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kegunaan untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap *Sustainability Report* (SR) pada era Pandemi COVID-19 dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Selain itu peneliti berharap pula dengan disusunnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

A. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan mengenai laporan keberlanjutan, pandangan pengambilan keputusan, dan bahan evaluasi bagi perusahaan sektor pertambangan dalam meningkatkan praktik tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan laporan keberlanjutan untuk memungkinkan perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin berdampak pada kinerja jangka panjang, namun juga untuk dapat membantu meningkatkan transparansi dan meningkatkan citra merek. Dengan melaporkan keberlanjutan, perusahaan dapat memitigasi dampak dari potensi risiko LST yang merupakan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dapat mempengaruhi aset, reputasi, dan kinerja operasional perusahaan, mengurangi limbah dan dengan demikian meningkatkan penghematan biaya, memastikan mereka mematuhi persyaratan peraturan dan membuat keputusan strategis yang lebih efektif.

B. Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai perluasan penerapan ilmu di bidang tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan dapat dijadikan bahan acuan dan literatur dalam membuat penelitian dengan topik serupa.

C. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat sebagai kontrol aktivitas

perusahaan terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan.

D. Penulis dan peneliti selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna dan pedoman bagi yang membutuhkan untuk melakukan riset-riset serupa, dengan potensi untuk mengisi celah-celah pengetahuan yang mungkin terlewatkan dalam penelitian sebelumnya sehingga dapat melengkapi segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian.

1.5 Kerangka Teori / Konsep

1.5.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling, 1976. Jensen menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak atau lebih (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Principal merujuk pada pemegang saham atau investor, sementara agent adalah manajemen yang menjalankan operasional perusahaan. Hubungan keagenan didasarkan pada pemisahan antara kepemilikan yang dipegang oleh investor dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Jika kedua fungsi ini terpisah, dapat timbul konflik keagenan antara pemilik dan manajemen. Konflik ini terjadi karena pihak manajemen dalam bertindak tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik, sehingga menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi tindakan manajemen. Ketidaksesuaian keputusan antara

manajemen dan keputusan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik dapat mengakibatkan residual loss, yakni kerugian atau penurunan kesejahteraan pemilik akibat penyimpangan keputusan tersebut.

Masalah keagenan muncul ketika *principal* sulit untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk kesejahteraan *principal*. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi berperan dalam mengurangi ketidakpastian, sehingga akuntan memiliki peran penting dalam mendistribusikan risiko antara manajer dan pemilik. Manajemen memiliki akses lebih luas terhadap informasi terkait potensi perusahaan, kondisi lingkungan kerja, serta gambaran menyeluruh mengenai perusahaan. Sebaliknya, pemilik tidak selalu memperoleh informasi yang cukup mengenai kinerja manajemen. Perbedaan akses ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan agen, yang dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetries*).

Pemilik perusahaan atau *principal*, selalu ingin memperoleh informasi lengkap mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk bagaimana pihak manajemen dalam mengelola dana yang telah diinvestasikan. *Principal* mendapatkan informasi tersebut melalui laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh manajemen sebagai agen, yang juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja agen dalam periode tertentu.

Namun, dalam praktiknya, agen dalam hal ini manajemen cenderung melakukan tindakan manipulatif agar laporan pertanggungjawaban terlihat baik, sehingga memberikan keuntungan bagi principal dan mencerminkan kinerja agen yang tampak positif. Untuk mengurangi risiko kecurangan ini, diperlukan peran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor. Kehadiran auditor membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh agen lebih andal (*reliable*) dan dapat dipercaya. Teori agensi menjelaskan bahwa auditor berperan dalam memahami dan mengatasi konflik antara *principal* dan agen. Auditor dalam konteks ini bertugas untuk memantau perilaku manajemen sebagai agen serta memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Auditor juga berfungsi sebagai penghubung antara kedua pihak, membantu *principal* dalam menilai pertanggungjawaban agen. Selain itu, auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh agen, dengan kualitas audit sebagai faktor utama dalam menilai keandalan laporan tersebut (Risfa & Lestari, 2023).

1.5.2 Teori Stakeholder

Teori dikemukakan dalam buku *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh (Freeman et al., 2005). *Stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas bisnisnya. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan internalnya, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi

berbagai pihak terkait, seperti kreditor, pemegang saham, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah, analis, serta pihak lainnya. Menurut teori ini, keberhasilan dan pertumbuhan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder*. Teori ini juga menegaskan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan mereka, baik informasi finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan secara sukarela mengungkapkan informasi yang relevan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada dukungan *stakeholder*. Dengan adanya *stakeholder*, perusahaan terdorong untuk berkembang secara berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya serta menjalankan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai tujuan bisnis dan memberikan kesejahteraan bagi para investornya (Mulianingsih, 2021).

Teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *manage stakeholdernya*. Cara-cara yang digunakan perusahaan itu bergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan tersebut (Parmar et al., 2010). Laporan keberlanjutan dan kinerja lingkungan merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh perusahaan untuk memberi informasi mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan, terutama investor dan kreditor,

memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana perusahaan mengelola dampak keberlanjutan dalam operasionalnya. Melalui pelaporan ini, perusahaan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, investor dan kreditor dapat lebih mudah menilai sejauh mana perusahaan memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan serta mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi atau pemberian pinjaman. Adanya kedua usaha tersebut, menandakan perusahaan telah melakukan transparansi informasi kepada para *stakeholdernya* yang mana ini akan menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan *stakeholder* (Putra, 2024).

1.5.3 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan suatu teori yang pertama kali dicetuskan oleh Dowling & Pfeffer, 1975 dimana memiliki fokus terhadap adanya interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya memperoleh legitimasi serta membangun dan memperkuat hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosial di mana mereka beroperasi. Jika suatu perusahaan tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, masyarakat dapat mencabut legitimasi yang telah diberikan, yang berpotensi menghambat operasional perusahaan.

Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap regulasi dan norma yang berlaku menjadi suatu keharusan agar perusahaan dapat terus beroperasi secara efektif dan mempertahankan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Terciptanya sebuah kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang berada disekitar tempat operasional yang memastikan keberlanjutan dan penerimaan perusahaan dalam lingkungan disebut dengan teori legitimasi Deegan & Unerman, 2006 (Ardiani et al., 2022).

Teorinya adalah bahwa perusahaan akan terus berusaha memastikan bahwa perusahaan melakukan operasi dan kegiatan bisnisnya sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat di sekitar lokasi perusahaan berperan dan memastikan bahwa setiap aktivitas operasional yang dijalankan dapat diterima oleh lingkungan serta komunitas setempat. (Aniktia et al., 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi ini akan memberikan dorongan pada sebuah pelaku bisnis maupun perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan untuk kegiatan sosial, lingkungan, serta ekonomi harus diungkapkan melalui pengungkapan *Sustainability report* (Al Fatihah & Widiatmoko, 2022). Tujuan yang diharapkan dari perusahaan dalam melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan ini adalah tentu saja untuk membuat perusahaan dapat *going concern*.

1.5.4 Good Corporate Governance (GCG)

1.5.4.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem tata kelola perusahaan yang memiliki cakupan lebih luas di masa depan. Jika sebelumnya akuntabilitas perusahaan hanya berpusat pada kepentingan pemegang saham (*stockholder*), kini cakupannya semakin berkembang hingga tata kelola perusahaan juga perlu memperhatikan kepentingan (*stakeholder*). Akibat yang muncul dari pergeseran paradigma ini, tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah seperti *corporate social responsibility* (CSR).

Kebijakan dan pengelolaan tata kelola perusahaan harus semakin memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Saat ini, pengungkapan informasi mengenai aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada *stakeholder*. Pendekatan ini dikenal sebagai *sustainability reporting* atau *triple bottom line reporting*, sebagaimana direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (Barung, 2018).

1.5.4.2 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan GCG merupakan langkah yang perlu diambil untuk menciptakan efisiensi kinerja sehingga dapat membangun kepercayaan pasar guna menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* dalam jangka

panjang. Penerapan *good corporate governance* memberi berbagai manfaat bagi perusahaan, di antaranya:

- a. Berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekaligus menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan.
- b. Meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban *stakeholder*.
- d. Menerapkan pendekatan yang terintegrasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi perusahaan secara *legitimate*.
- e. Membangun kepercayaan investor dengan menunjukkan bahwa investasi aman, dikelola secara transparan, efisien, serta didukung oleh proses yang akuntabel.
- f. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten, konsekuen dan penuh dengan komitmen diharapkan mampu membuat perusahaan akan menjadi lebih handal karena secara umum manfaat lainnya adalah:

- a. Perusahaan dapat beroperasi lebih efisien.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
- c. Menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
- d. Memungkinkan evaluasi terhadap pencapaian kinerja manajemen.
- e. Meminimalkan risiko dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam praktik *Good Corporate Governance* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas Implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* harus mempertimbangkan karakter perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

1.5.4.3 Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, diutarakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

a. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi menjadi aspek penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dengan jelas kondisi perusahaan, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang. Sebagai bentuk transparansi, *annual report* perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan guna memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan kebijakan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan yang *go public*, di mana keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan pihak terkait.

Transparan berarti sesuatu yang jelas (*obvious*) dan dapat dilihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi mengacu pada keterbukaan dalam menjalankan berbagai proses kegiatan di dalam perusahaan. Prinsip ini mendorong pengungkapan kondisi yang sebenarnya agar seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat menilai serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Transparansi dapat diterapkan melalui penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, pengungkapan kriteria seleksi personal secara terbuka, pemberitahuan mengenai adanya proses seleksi, serta keterbukaan dalam transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki

hubungan khusus. Selain itu, transparansi juga mencakup pengungkapan struktur kepemilikan perusahaan dan informasi mengenai potensi risiko yang dapat dihadapi organisasi.

Prinsip transparansi sangat berkaitan dengan kepentingan manajemen dan karyawan, karena mereka berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan, baik saat dalam keadaan stabil maupun menghadapi tantangan keuangan. Dalam praktiknya sering kali perusahaan kurang transparan, baik terhadap pihak internal seperti manajemen dan karyawan, maupun pihak eksternal seperti pemegang saham dan kreditor.

Pemegang saham berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi perusahaan serta memiliki peran dalam pengambilan keputusan penting yang dapat memengaruhi arah perusahaan, termasuk perubahan mendasar dalam struktur bisnis. Selain itu, mereka juga berhak menerima bagian keuntungan dari kinerja perusahaan. Pengungkapan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai aspek-aspek krusial seperti kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Dengan menerapkan transparansi secara optimal, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan pemegang saham dan kreditor, tetapi juga berkontribusi

pada kesejahteraan manajemen dan karyawan, yang merupakan bagian integral dari *stakeholder* perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

1. Membangun sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Mengoptimalkan teknologi informasi serta sistem manajemen informasi guna memastikan pengukuran kinerja yang akurat guna menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.
3. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi serta pelaksanaan tanggung jawab oleh setiap organ perusahaan, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara optimal dan efektif. Jika prinsip akuntabilitas diterapkan dengan baik, perusahaan dapat menghindari permasalahan benturan kepentingan (*agency problem*). Akuntabilitas mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, baik dalam menjelaskan kinerja maupun tindakan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan tersebut. Melalui penerapan prinsip ini, proses pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan dapat dipantau,

dievaluasi, serta dikritisi secara transparan. Selain itu, akuntabilitas juga mencerminkan adanya keterlacakan (*traceability*), yang memungkinkan setiap tindakan ditelusuri hingga ke bukti dasarnya, serta kewajaran (*reasonableness*), yang menjamin bahwa setiap keputusan dapat diterima secara logis.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility yaitu wujud kepatuhan perusahaan terhadap prinsip pengelolaan yang sehat dan penegakan perundang-undangan termasuk ketentuan sosial, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, pajak, ketenagakerjaan, serta peraturan lainnya yang berhubungan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

1. Wewenang yang diberikan secara otomatis membawa konsekuensi berupa tanggung jawab.
2. Memahami pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
4. Menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

d. *Independency* (Independensi)

Prinsip independen mewajibkan perusahaan bekerja secara profesional tanpa adanya dominasi serta intervensi yang muncul dari golongan tertentu yang tidak selaras dengan aturan yang masih berjalan. Penerapan prinsip *independency* pada perusahaan yaitu

memastikan bahwa pengurusnya memiliki integritas tinggi sehingga dalam mengambil kebijakan bebas dari tekanan pihak lain serta terbebas dari benturan kepentingan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

1. Setiap organ dalam perusahaan harus menjaga independensinya dengan menghindari dominasi dari pihak mana pun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) maupun tekanan eksternal. Dengan demikian, seluruh keputusan yang diambil dapat dilakukan secara objektif dan berpihak pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan.
2. Setiap organ dalam perusahaan harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka harus bekerja secara profesional tanpa saling mendominasi maupun mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang telah dipercayakan, memastikan transparansi dalam penyampaian informasi serta kondisi perusahaan yang sebenarnya, memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham dan pemangku

kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab hukum manajemen. Secara umum, perusahaan menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai tujuannya, yang umumnya berkaitan dengan aspek-aspek mendasar, seperti:

1. Perusahaan perlu memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal, baik secara efektif maupun efisien. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek kegiatan perusahaan, seperti sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran, serta produksi, guna memastikan operasional yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
2. Pentingnya menjaga konsistensi dalam penerapan sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham agar perusahaan dapat secara efektif mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara keduanya. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap objektif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan.
3. Perusahaan harus mampu membangun kepercayaan dari penyandang dana eksternal dengan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, manajemen harus bertindak secara optimal demi kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam

pengelolaan dana, perusahaan perlu menerapkan sistem tata kelola yang baik, yang dapat memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor. Dengan adanya perlindungan ini, para investor dan kreditor dapat merasa yakin bahwa investasi mereka akan memberikan keuntungan yang wajar dan bernilai tinggi. Selain itu, sistem pengelolaan yang baik juga harus mampu menjamin kesejahteraan karyawan serta keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang didasarkan pada perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menjadi landasan dalam memantau dan memastikan perlakuan yang adil terhadap berbagai kepentingan dalam perusahaan. Kewajaran menekankan bahwa setiap *stakeholder* harus mendapatkan perlakuan yang setara (*equal treatment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini terutama ditujukan untuk menjaga keseimbangan hak antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kewajaran juga harus diterapkan dalam hubungan dengan *stakeholder* lainnya, seperti karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan. Untuk menjamin keadilan, hak-hak karyawan, kreditor, serta mitra bisnis harus ditetapkan secara jelas dengan melibatkan

sebanyak mungkin pihak terkait. Perusahaan juga harus memastikan transparansi dalam penyampaian informasi penting kepada seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan asing, serta mencegah praktik pembagian keuntungan yang tidak sah oleh pihak internal atau penyalahgunaan informasi oleh pihak internal.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

1. Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
2. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam (*internal*) dan konflik kepentingan.

1.5.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: *total aset*, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu: “perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Variabel ini diukur dengan rata-rata jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (total aset). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio. Ukuran (*size*) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil (Brigham & Houston, 2013).

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang tertera dari laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan yang relatif lebih besar dibandingkan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural* Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan *log natural*, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.

Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{LN} (\text{Total Asset})$$

1.5.6 *Sustainability report (SR)*

Laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) memiliki berbagai definisi tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (2002), laporan berkelanjutan diartikan sebagai laporan publik yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai posisi serta aktivitasnya baik internal maupun eksternal perusahaan. *Global Reporting Initiatives* (GRI) merupakan salah satu pedoman yang digunakan mayoritas perusahaan atau organisasi di dunia. Dalam panduan pelaporan keberlanjutan, GRI membuat dua konsep standar pengungkapan, yaitu pengungkapan setandar umum dan pengungkapan standar khusus. Pengungkapan standar umum memuat strategi analisis, profil organisasi, aspek material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, etika dan integritas. Sementara pengungkapan standar khusus memuat pengungkapan pendekatan manajemen dan indikator, kemudian indikator diperdalam dengan mengkonsep tiga kategori yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang masing masing memiliki sub- kategori yang harus perusahaan laporkan.

Pelaporan ini dilakukan dalam rangka mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, yang dikenal dengan istilah *triple bottom line reporting*. Dengan demikian, laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) dapat diartikan sebagai laporan yang menguraikan dampak

operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan (Barung, 2018).

1.6 Pengaruh Antar Variabel

1.6.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Sustainability Report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

Komisaris independen adalah suatu entitas dalam perusahaan yang umumnya terdiri dari anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Peran utama mereka adalah mengevaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh dan objektif. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam rangka melindungi hak pemegang saham minoritas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adanya dewan komisaris independen yang tidak mudah terpengaruh oleh manajemen dalam mengambil keputusan di perusahaan membuat perusahaan bisa mengungkapkan hasil kinerja perusahaan dengan apa adanya dan sesuai dengan kondisi perusahaan (Safitri & Septiani, 2022).

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan berupaya memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan dengan mengungkapkan *sustainability report* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Apabila jumlah komisaris independen semakin besar, hal ini dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan (Madona & Khafid, 2020). Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang ditemukan oleh (Aliniar &

Wahyuni, 2017) menyebutkan bahwa semakin banyak anggota komisaris independen menentukan pengungkapan *sustainability report*.

1.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

Kepemilikan manajerial mengacu pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, termasuk direksi dan komisaris, yang dinilai berdasarkan persentase jumlah saham yang mereka miliki. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan, semakin tinggi dorongan mereka untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ini disebabkan oleh tanggung jawab manajemen dalam memenuhi kepentingan para pemegang saham, termasuk kepentingan mereka sendiri sebagai bagian dari pemegang saham. Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, terdapat kecenderungan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Transparansi ini bertujuan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan (Madona & Khafid, 2020).

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* diartikan bahwa sedikit atau banyaknya manajemen yang memiliki saham pada perusahaan tidak menjamin manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih untuk pemegang saham, salah satunya pengungkapan *sustainability report* (Amalasari, 2023). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya untuk

kepentingan perusahaan itu sendiri, namun juga untuk kepentingan para pemegang saham. Manajer dalam hal ini berperan sebagai pemegang saham sekaligus orang yang menjalankan perusahaan tentunya ingin memberikan timbal balik berupa keuntungan dan laba yang tinggi. Manajer sekaligus pemegang saham perusahaan dapat menggunakan kekuasaan manajer mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang lebih kepada pemegang saham yaitu dirinya sendiri. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Madona & Khafid, (2020), dan Aniktia et al., (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Ketidak berpengaruhnya terhadap pengungkapan *sustainability report* diperkirakan disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak manajer perusahaan tidak memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan yang mereka pimpin, atau jika mereka memiliki saham, kepemilikan tersebut umumnya kecil. Selain itu, kepemilikan manajerial yang relatif kecil membuat manajer belum mampu secara optimal meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report*. Alasan lainnya

kemungkinan jika manajemen tidak mempunyai saham pada perusahaan cenderung akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan seperti profit. Karena ketika perusahaan mempunyai profit yang tinggi manajemen tentu akan mendapatkan bonus dari profit tersebut dan manajemen pun tidak mempedulikan perusahaan mengungkapkan *sustainability report* atau tidak karena tidak mempunyai saham untuk jangka panjang.

1.6.3 Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh hubungan antara Komisaris Independen terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik diperkirakan memiliki peluang lebih besar untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara sukarela. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi kebutuhan para *stakeholder*. Salah satu elemen penting dalam GCG adalah komisaris independen, yang memiliki peran utama dalam memastikan prinsip tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik. Komisaris independen bertugas memberdayakan dewan komisaris agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi secara lebih efektif. Dengan adanya peran tersebut, komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya melalui pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Idah, 2013).

Berdasarkan teori legitimasi, ukuran perusahaan diperkirakan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sebagai salah satu karakteristik yang memengaruhi tingkat kepercayaan investor, perusahaan dengan skala lebih besar perlu membangun kredibilitas yang kuat. Oleh karena itu, kontribusi terhadap perkembangan sosial dan kelestarian lingkungan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Utari, 2008). Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total aset mencerminkan tingkat kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Peningkatan total aset menunjukkan bertambahnya nilai kekayaan perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk lebih berkontribusi dalam aktivitas sosial guna memperoleh legitimasi dari masyarakat. Semakin aktif perusahaan dalam kegiatan sosial, semakin banyak informasi yang akan diungkapkan dalam *sustainability report*. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.6.4 Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh hubungan antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen. Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, terdapat kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan transparansi dengan menyampaikan lebih banyak informasi kepada publik

guna memperoleh legitimasi dari masyarakat. Apabila anggota tim manajemen juga berperan sebagai pemegang saham, mereka diperkirakan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pengungkapan informasi terkait aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Informasi tersebut biasanya dituangkan dalam *sustainability report* sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para *stakeholder*. Semakin besar kepemilikan manajemen pada suatu perusahaan, maka kinerja manajemen akan semakin lebih baik terhadap perusahaan karena akan berdampak pada pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Ukuran perusahaan merujuk pada besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak pula investor yang menanamkan modalnya, termasuk kepemilikan saham oleh manajemen yang cenderung meningkat. Kepemilikan saham yang lebih besar oleh manajemen mendorong mereka untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna menghasilkan keuntungan (*profit*) yang lebih tinggi. Peningkatan laba perusahaan berpengaruh terhadap besarnya dividen yang diterima oleh para pemegang saham, termasuk manajer, serta memungkinkan mereka memperoleh bonus tambahan jika profit perusahaan meningkat. Oleh karena itu, manajemen akan lebih memperhatikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengungkapkan

sustainability report sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sosial guna memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Idah, 2013 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dalam konteks teori agensi, perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi. Untuk menekan biaya tersebut, perusahaan akan lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi. Selain itu, perusahaan besar juga lebih mendapat perhatian dari publik, oleh karena itu peningkatan transparansi dalam pengungkapan informasi menjadi strategi untuk mengurangi biaya politis serta mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Esa Dewi Amalasari (2022)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan <i>Sustainability report</i> (Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sektor Barang Konsumsi)	Independen: - Komisaris Independen - Komite Audit - Kepemilikan Manajerial Dependen: <i>Sustainability report</i>	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Sustainability report</i> . 2. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Sustainability report</i> .
2.	Elsa Dwi Safitri dan Aditya Septiani (2022)	Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terhadap	Independen - Ukuran Dewan Komisaris	1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability</i>

			<i>Sustainability reporting</i>		- Dewan Komisaris Independen - Dewan Direksi Wanita - Diversitas Kebangsaan Dewan Direksi Dependen <i>Sustainability report</i>	<i>Reporting.</i> 2. Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability reporting.</i> 3. Dewan Direksi Wanita berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability Reporting.</i> 4. Diversitas Kebangsaan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap <i>Sustainability reporting.</i>
3.	Mulya Madona dan Muhammad Khafid (2020)	Adra dan	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability report</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi	<i>Good</i>	Independen: - Komisaris Independen - Komite Audit - Kepemilikan Manajerial - Ukuran Perusahaan Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability report</i>	1. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>Sustainability report.</i> 2. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Sustainability report.</i> 3. Ukuran Perusahaan memoderasi secara signifikan proporsi Komisaris Independen terhadap pengungkapan <i>Sustainability report.</i> 4. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh

					Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Sustainability report</i> .
4.	Intan Pramesti Dewi dan Pipit Pitriasari (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability report</i> (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016)	Independen: - Komite Audit - Komisaris Independen Dependen - <i>Sustainability report</i>	1.	Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Sustainability report</i> .
5.	Margaretha Barung, Aaron M. A. Simanjuntak, dan Linda Y. Hutadjulu (2018)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability report</i> (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)	Independen: - Dewan Komisaris - Komisaris Independen - Ukuran Komite Audit - Kepemilikan Saham Institusional - Kepemilikan Saham terkonsentrasi - Ukuran perusahaan Dependen: Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability report</i>	1. 2.	Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability report</i> . Kepemilikan Saham terkonsentrasi berpengaruh terhadap <i>Sustainability report</i> .
6.	Dwita Aliniar dan Sri Wahyuni (2017)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability report</i> pada Perusahaan Terdaftar di BEI	Independen: - Ukuran Dewan Komisaris - Ukuran Komisaris Independen - Ukuran Komite Audit	1. 2.	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability report</i> . Kepemilikan Saham terkonsentrasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap

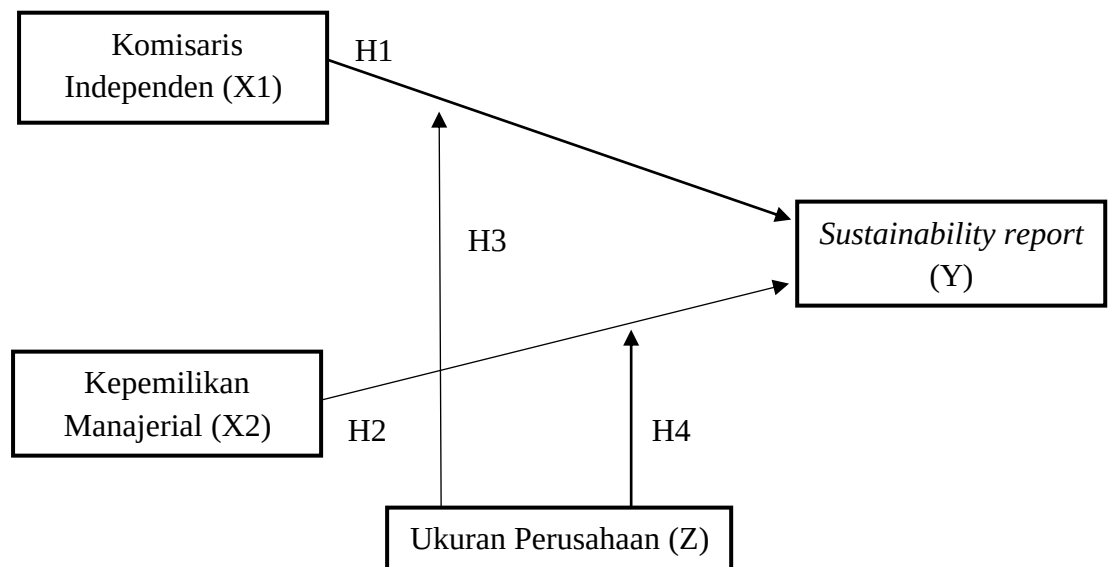
-
- Ukuran Kepemilikan Saham
 - Kepemilikan Saham Terkonsentrasi
 - Ukuran Perusahaan

Dependen:
Kualitas
Pengungkapan
Sustainability report

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2024

1.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban dari rumusan masalah penelitian yang berlandaskan pada teori yang relevan serta masih harus dibuktikan kebenarannya atau masih bersifat sementara (Sugiyono, 2019). Berikut hipotesis dari penelitian ini:



Gambar 1. 2 Model Hipotesis

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Keterangan:

H₁: Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

H₂: Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

H₃: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara Komisaris Independen terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

H₄: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Sustainability report* (SR) pada era Pandemi COVID-19

1.9 Definisi Konseptual

1. Komisaris Independen

Menurut Lukman & Geraldine, (2020) komisaris independen adalah anggota dewan direksi komisaris yang tidak mempunyai keluarga dan usaha hubungan dengan pemegang saham atau anggota dewan lainnya yang dapat mempengaruhi independensinya dalam bertindak.

2. Kepemilikan Manajerial

Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen pada perusahaan maka akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

3. Ukuran Perusahaan

Menurut Kettler and Scholes, (1970) ukuran perusahaan adalah cerminan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Hal ini karena perusahaan yang berukuran besar dianggap lebih menguntungkan.

4. *Sustainability report* (SR)

Laporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) sebagai laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (Elkington, 1997).

1.10 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah jabaran variabel penelitian yang terinci dan terukur, digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian.

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	<i>Sustainability report</i> (SR)	Alat untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang melaporkan kinerjanya dalam tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan	Nilai 1 = mengungkapkan SR Nilai 0 = tidak mengungkapkan SR
2.	Komisaris Independen	Merupakan rasio antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap total Dewan Komisaris perusahaan.	$\frac{(\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen})}{(\text{Jumlah Seluruh Anggota dewan Komisaris})} \times 100$
3.	Kepemilikan Manajerial	Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh	$\frac{(\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial})}{(\text{Jumlah Saham Beredar})} \times 100$

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
		modal saham perusahaan yang dikelola	
4.	Ukuran Perusahaan	Ukuran yang dapat menggambarkan besarnya suatu perusahaan. Ada 3 kategori perusahaan yaitu perusahaan besar (<i>large firm</i>), perusahaan menengah (<i>medium size</i>), perusahaan kecil (<i>small firm</i>).	Ukuran Perusahaan = $\ln (Total Asset)$

1.11 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) untuk mengetahui variabel independen diantaranya komisaris independen, kepemilikan manajerial dan *sustainability report* (SR) selaku variabel dependen serta mengetahui pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Untuk mengetahui informasi mengenai variabel dependen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 53 perusahaan.

1.11.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatori yaitu penelitian yang menerangkan adanya hubungan antar variabel. Karakteristik pada studi ini mempunyai sifat replikasi sehingga hasil pengujian hipotesis wajib didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang diulang pada keadaan lain yang kurang lebih setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Komisaris Independen, Kepemilikan

Manajerial terhadap *Sustainability report* (SR) selaku variabel dependen serta mengetahui pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (Sugiyono, 2017).

1.11.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu idx.co.id. Pemilihan situs tersebut didasarkan pada peran BEI sebagai salah satu pusat perdagangan saham perusahaan yang telah *go public* di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan, yang termasuk dalam kategori data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber lain, seperti Bursa Efek Indonesia, di mana data keuangan tersebut telah diolah dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

1.11.3 Populasi dan Sampel

1.11.3.1 Populasi

Penelitian ini memiliki batasan pada pemilihan populasi dan periode penelitian. Populasi penelitian ini diseleksi menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020 – 2022 atau selama tiga tahun berturut – turut dengan total 54 perusahaan yang terdiri dari 4 kategori yaitu:

1. Pertambangan Batubara (Produksi Batubara)
2. Pertambangan Minyak & Gas Bumi (Produksi & Penyulingan Minyak & Gas)
3. Pertambangan Logam & Mineral
4. Pertambangan Batu – Batuan

Tabel 1. 3 Daftar Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2020-2022

No	Nama Emiten	Kode Emiten
1	Adaro Minerals Indonesia Tbk	ADMR
2	Adaro Energy Tbk	ADRO
3	Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	AIMS
4	Atlas Resources Tbk	ARII
5	Bara Jaya International Tbk	ATPK
6	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	BORN
7	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	BOSS
8	Berau Coal Energy Tb	BRAU
9	Bumi Resources Minerals Tbk	BRMS
10	Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR
11	Bumi Resources Tbk	BUMI
12	Bayan Resources Tbk	BYAN
13	Darma Henwa Tbk	DEWA
14	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
15	Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA
16	Alfa Energi Investama Tbk	FIRE
17	Golden Energy Mines Tbk	GEMS
18	Garda Tujuh Buana Tbk	BTBO
19	Harum Energy Tbk	HRUM
20	MNC Energy Investments Tbk.	IATA
21	Indika Energy Tbk	INDY
22	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
23	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI
24	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP
25	Prima Andalan Mandiri Tbk	MCOL

No	Nama Emiten	Kode Emiten
26	Samindo Resources Tbk	MYOH
27	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
28	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
29	Petrosea Tbk	PTRO
30	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT
31	Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA
32	Trada Alam Minera Tbk	TRAM
33	Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI
34	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	BIPI
35	Elnusa Tbk	ELSA
36	Energi Mega Persada Tbk	ENRG
37	Surya Esa Perkasa Tbk	ESSA
38	Medco Energi International Tbk	MEDC
39	Mitra Investindo Tbk	MITI
40	Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS
41	Sugih Energy Tbk	SUGI
42	Super Energy Tbk.	SURE
43	Ginting Jaya Energi Tbk	WOWS
44	Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM
45	Cita Mineral Investindo Tbk	CITA
46	Cakra Mineral Tbk	CKRA
47	Central Omega Resources Tbk	DKFT
48	Ifishdeco Tbk	IFSH
49	Vale Indonesia Tbk	INCO
50	J Resources Asia Pasific Tbk	PSAB
51	SMR Utama Tbk	SMRU
52	Timah (Persero) Tbk	TINS
53	Kapuas Prima Coal Tbk	ZINC
54	Citatah Tbk	CTTH

Sumber: www.idx.co.id

1.11.3.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Diperoleh 17 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan sehingga diperoleh 51 unit analisis.

Tabel 1. 4 Daftar Sampel Perusahaan

No	Nama Emiten	Kode Emiten
1	Atlas Resources Tbk	ARII
2	Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR
3	Bayan Resources Tbk	BYAN
4	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
5	Harum Energy Tbk	HRUM
6	Indika Energy Tbk	INDY
7	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
8	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI
9	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP
10	Samindo Resources Tbk	MYOH
11	Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
12	Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS
13	Ginting Jaya Energi Tbk	WOWS
14	Aneka Tambang (Persero) Tbk	ANTM
15	Central Omega Resources Tbk	DKFT
16	Ifishdeco Tbk	IFSH
17	Kapuas Prima Coal Tbk	ZINK

Sumber: www.idx.co.id

1.11.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* yaitu teknik diambilnya sampel dengan cara tidak memberi kesempatan kepada seluruh populasi. Teknik *non probability sampling* yang dipakai yaitu *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan syarat kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel. Berikut kriteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini.

Tabel 1. 5 Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022	54
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (<i>purposive sampling</i>)	

1.	Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia	-8
2.	Perusahaan yang tidak memublikasikan laporan tahunan	-5
3.	Perusahaan yang mengalami delisting pada tahun (2020-2022)	-3
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial pada tahun (2020-2022)	-21
Sampel Penelitian		17
Total Sampel (n x periode penelitian) (17 x 3)		51

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

1.11.5 Jenis dan Sumber Data

1.11.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa berupa data panel yang merupakan kombinasi antara data *time series* serta *cross section*. Data kuantitatif ialah data yang menyajikan angka. Data *time series* (deret waktu) ialah data yang dikumpulkan beberapa tahun secara berkala. Data *cross section* ialah data yang diamati pada waktu yang sama pada beberapa hal yang menjadi variabel penelitian (Sujarweni, 2019). Data penelitian ini berupa data menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis data laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022.

1.11.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) untuk mengetahui variabel independen yaitu

good corporate governance diantaranya ada komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan serta laporan keberlanjutan (*sustainability report*) untuk mengetahui informasi mengenai variabel dependen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 54 perusahaan.

1.11.6 Skala Pengukuran

Tabel 1. 6 Skala Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Pengukuran
	<i>Sustainability report</i>	Nilai 1 = mengungkapkan SR Nilai 0 = tidak mengungkapkan SR
	Komisaris Independen	$\frac{(\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen})}{(\text{Jumlah Seluruh Anggota dewan Komisaris})} \times 100\%$
	Kepemilikan Manajerial	$\frac{(\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial})}{(\text{Jumlah Saham Beredar})} \times 100\%$
	Ukuran Perusahaan	SIZE= LN (<i>Total Asset</i>)

Sumber: Dikelola peneliti, 2024

1.11.7 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan menganalisis data serta studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa statistik tahunan dengan menganalisis data laporan keuangan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Laporan teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan

memahami literatur dari jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta referensi lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

1.11.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan *metode Partial Least Square (PLS)* yaitu menggunakan perangkat lunak SmartPLS. PLS merupakan salah satu pendekatan dalam *Structural Equation Modeling (SEM)* yang sering dibandingkan dengan teknik SEM lainnya. Metode ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghubungkan teori dengan data serta memungkinkan analisis jalur (*path analysis*) menggunakan variabel laten, sehingga banyak digunakan dalam penelitian di bidang ilmu sosial. *Partial Least Square (PLS)* dikenal sebagai metode analisis yang kuat karena tidak bergantung pada banyak asumsi. Data yang digunakan tidak harus berdistribusi normal multivariat, dan model dapat mencakup indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, hingga rasio dalam satu analisis. Selain itu, metode ini tidak memerlukan ukuran sampel yang besar. PLS tidak hanya digunakan untuk mengonfirmasi teori, tetapi juga untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten dalam suatu model penelitian. Oleh karena itu, metode ini lebih sesuai untuk penelitian berbasis prediksi serta analisis hubungan antar variabel laten dalam berbagai bidang penelitian.

1.11.9 Analisis Data

Model ini menspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel lainnya. Uji yang dilakukan pada outer model:

1.11.9.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi Model Pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi standar lulus uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Convergent validity

Nilai convergent validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikator. Diuji menggunakan *Outer Loadings (Loading Factor)* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai loading faktor $> 0,7$ dikatakan valid.

2. Discriminant Validity

(Fornell & Larcker, 1981) menyarankan bahwa *Average Variance Extracted (AVE)* dari setiap variabel laten harus lebih besar daripada korelasi antar variabel laten lain. Diuji dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted (AVE)* dengan korelasi antar konstruk. *Cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan suatu konstruk memiliki *loading factor* yang lebih tinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan loading pada konstruk

lain (Hair et al, 2014) menjelaskan bahwa nilai loading factor > 0,50 dianggap signifikan secara praktikal.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas konstruk diuji dengan melihat *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha*. Nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 dan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 sudah dapat digunakan dan menunjukkan bahwa indikator yang digunakan dalam model memiliki konsistensi internal yang baik.

1.11.9.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

1. Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)

Menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Apakah suatu hipotesis memiliki pengaruh atau tidak. Path coefficients memiliki nilai yang berada di rentang -1 sampai dengan 1. Jika nilai berada pada rentang 0 sampai dengan 1 maka dapat dinyatakan positif, sedangkan jika nilai berada pada rentang -1 sampai dengan 0 maka dapat dinyatakan negatif.

2. *R-square*

R-square merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen (eksogen) mempengaruhi variabel dependen (endogen). *R-squared* merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Menurut (Chin, 1998) jika nilai $R^2 = 0,75 \rightarrow$

substansial (besar/kuat), jika nilai $R^2 = 0,50 \rightarrow$ moderate (sedang) dan Jika nilai $R^2 = 0,25 \rightarrow$ lemah (kecil).

3. *F-Square (Effect Size)*

Untuk mengetahui menilai besarnya pengaruh antar variabel dengan *Effect Size* atau *F-Square Effect*. Interpretasi nilai *F-Square* menurut (Chin, 1998) adalah sebagai berikut 0.02 pengaruh lemah, 0.15 pengaruh moderat, 0.35 pengaruh besar.

1.11.10 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis *inner model* (model struktural), yang mencakup beberapa output utama seperti nilai *R-square*, koefisien parameter, dan *t*-statistik. Untuk menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak, perlu diperhatikan beberapa indikator, di antaranya nilai signifikansi antar konstruk, *t*-statistik, dan *p-values*. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS (*Partial Least Square*), yang memungkinkan analisis data berbasis model struktural. Nilai-nilai statistik yang diperlukan dalam pengujian dapat diperoleh melalui proses *bootstrapping*. Aturan umum (*rules of thumb*) yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan tingkat signifikansi *p-value* sebesar 0,05 (5%), serta memastikan bahwa koefisien beta memiliki nilai positif sebagai indikator hubungan yang searah dan signifikan.